

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.04

Jl.Simpurusiang

Masamba - Sulawesi Selatan 92961

Telp. 0473-21626 Fax. 0473-21821

e-mail: info@pa-masamba.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.Simpurusiang

Telp. 0473-21626 Fax. 0473-21821

Masamba - Sulawesi Selatan 92961

e-mail : info@pa-masamba.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Masamba adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Masamba mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Masamba. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Masamba, 08 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Masamba (Masamba Religious Court). The stamp contains the court's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Iskandar, S.Kom

NIP.197601252009041006

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar [isi](#)

Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
A.1. Dasar Hukum.....	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Masamba	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
A.4. Basis Akuntansi	18
A.5. Dasar Pengukuran	18
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja.....	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar	29
C.2. Aset Tetap	30
C.3. Aset Lainnya	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.5. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	36
D.2.	Beban Pegawai.....	36
D.3.	Beban Persediaan	37
D.4.	Beban Jasa.....	37
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	38
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	38
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.8.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	39
D.9.	Beban Lain-lain.....	40
D.10.	Kegiatan Non Operasional	40
D.11.	Pos Luar Biasa	41
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
E.1.	Ekuitas Awal.....	41
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	41
E.3.	Koreksi Nilai Aset	42
E.3.1.	Koreksi Aset Persediaan	42
E.3.2.	Koreksi Aset Tetap	42
E.3.3.	Selsisih Revaluasi Aset tetap	42
E.3.4.	Koreksi Aset Tetap non revaluasi	42
E.4.	Koreksi Lain-lain	43
E.5.	Transaksi antar entitas.....	43
E.6.	Ekuitas Akhir.....	44
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	44
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	44
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	44
	Daftar dan Lampiran	46
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	47
	Daftar Hibah Langsung	50

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Masamba

Jl.Simpurusiang Masamba - Sulawesi Selatan 92961

Telp. 0473-21626 Fax. 0473-21821 e-mail : info@pa-masamba.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Masamba, 08 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Iskandar, S.Kom

NIP.197601252009041006

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Masamba Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau tidak tercapai dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 149,985,000 atau mencapai 100%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 2023 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp, **3,114,702,640** yang terdiri, Aset Lancar sebesar Rp. **15,556,400**; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 2,741,050,678; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. **Rp. 2,741,050,678**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. **3,114,702,640**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3,283,075,807 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp .0 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0

dan surplus(defisit) sebesar Rp. 3,283,075,807 sehingga entitas surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (3,283,075,807).

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 1,614,701 , dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (97,541,201), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (0), dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 95,926,500, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 0

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 , disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0
B.	Belanja Negara	B.2	149,985,000	149,985,000	100	
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	100	
2.	Belanja Barang	B.2.2.	149,985,000	987,939,651	100	
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	100.00	0
	Jumlah Belanja Negara		149,985,000	149,985,000	95	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar		0	1,614,701
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 3.		
Persediaan	C. 4.		1,614,701
Jumlah Aset Lancar		0	1,614,701
Aset Tetap			
Tanah	C. 5.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 6.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 7.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 8.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 9.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 10.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 11.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset lainnya	C. 12.		
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 13.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	34,857

Jumlah Kewajiban	0	69,714
EKUITAS		
Ekuitas	C. 14.	
Jumlah Ekuitas	0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan	57,178 ,500	48,898,000	8,280,500
Beban			
Beban Pegawai	0	0	0
Beban Persediaan	9,684, 701	11,673,064	1,988,363
Beban Barang dan Jasa	0	0	0
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	81,060 000	78,630,000	2,430,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		3,283,075,807	3,261,790,970
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	7,54.4 201	104,365,064	6,823,863
Kegiatan Non Operasional			
D. 11			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		()	()
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	410,000

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 12		
Pendapatan PNPB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		3,283,075,807	3,261,790,970

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E. 1	7,785,900	36,171,199
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(97,541,20)	(104,365,064)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	(0)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	(0)	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.	95,926,500	98,193,865
Ekuitas Akhir		1,614,701	1,614,701

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Masamba

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana cita atau tujuan akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat–*stakeholder/justitiabelen*.

Misi *adalah* suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Masamba di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Masamba menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010–2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Pengadilan Agama Masamba sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Masamba telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Masamba, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MASAMBA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Masamba sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Masamba telah menjabarkan visi tersebut ke dalam misi Pengadilan Agama Masamba, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Masamba melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
6. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (**SAKTI**) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan ASET adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Masamba adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
115.311.000*

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Masamba telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan			
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3	Pendapatan Hibah Dalam Negeri ♦ Langsung Bentuk Barang	0	0
Total Pendapatan		0	0

Pendapatan pada tahun TA 2024 sesuai estimasi penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sebesar 0 tidak terealisasi disebabkan karena tidak ada pegawai pindah dari satker lain yang dimintakan persekot/uang muka gaji. Tetapi pada tahun TA 2024

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2024 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2024 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	2024	Perubahan	
				Rp	%
1.		0	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	80	(80)	(100,00)
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	(0)
4.	Pendapatan Hibah Dalam	0	0	0	0,00

Negeri - Langsung Bentuk

Barang

Total Pendapatan	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
3.545.078.061

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp. 3,236,110,077 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 490,518 % dari anggaran senilai Rp.. 3,408,769,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	149,985,000	149,985,000	100
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	149,985,000	149,985,000	(98
Pengembalian Belanja			
Total Belanja Netto	149,985,000	149,985,000	

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik (Turun)
			%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	149,985,000	144,890,000	(100)
Belanja Modal	0	0	
Total Belanja	149,985,000	144,890,000	(100)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
2.863.219.99
6

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. Rp. 0 dan 0

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0			()
Beban Pembulatan Gaji PNS	0			
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0			(
Beban Tunj. Anak PNS	0			()
Beban Tunj. Struktural PNS	0)
Beban Tunj. Fungsional PNS	0			
Beban Tunj. PPh PNS	0			()
Beban Tunj. Beras PNS	0)
Beban Uang Makan PNS	0			
Beban Tunjangan Umum PNS	0			
Beban Tunjangan Kemahalan	0			()
Hakim				
Total Belanja Brutto		0		()
Pengembalian Belanja				()
Total Belanja Netto		0		

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
630.046.06
5

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember TA 2024 dan TA 20243 adalah sebesar Rp. **149,985,000** dan Rp. **144,890,000** Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	0			
Belanja Barang Non Operasional	0			
Belanja Jasa	50,000,000	50,000,000		
Belanja Pemeliharaan	0	0		
Belanja Perjalanan Dinas	81,060,00	78,630,000		
Total Belanja Brutto	149,985,000	144,890,000		
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Total Belanja Netto	149,985,000	144,890,000		

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
51.812.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin		0	()	
Total Belanja Brutto		0	()	()
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto		0	()	()

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Nilai Aset Lancar per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Masamba per 30 September 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 30 September 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	0	1,614,701
Total Aset Lancar	0	1,614,701

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September TA 2024	30 September TA 2023
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp 2,988,138*

Persediaan per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 1,614,701. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Persediaan per 30 September TA 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
0*

Nilai Aset Tetap per 30 September 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 September TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 September 2018	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	0

Nilai Buku 30 September 2024

0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 September 2024	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	0
Nilai Buku 30 September 2024	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 September 2024	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2019	0

Nilai Buku 30 September 2024

0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 September 2024	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	0
Nilai Buku 30 September 2024	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2023 tercatat sebesar Rp. 0. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Masamba per 30 September 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 6. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Uang Muka dari KPPN	0	0

Jumlah	0	0
--------	---	---

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 4,214,751*

Ekuitas per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 1,614,701. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp 26,369,800 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp 57,178,500.

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 September TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara bukan pajak lainnya		57,178,500	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara		0	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		0	0
Total Pendapatan		25,660,000	29.105.500	110,92

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 1,226,613 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 11,085,900 dan Rp., 1,678,500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0

Total Beban Persediaan	1446,732	435,200	(1.011.532)	(231)
------------------------	----------	---------	-------------	-------

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp
2.500.000

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,200,000 dan Rp.. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0			
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	50,000,000			
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	2,200,000	0	0	0
Total Beban Jasa				88.6

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
6,120,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,684,701 dan Rp.. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	9,684,701	0		0,00
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	9,684,701	0		0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	9,684,701	0		(0,00)

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp 0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 20120	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				

Jumlah Penyusutan

Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.7. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.8. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.9. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.10. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 30 September TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0

Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1,614,701 dan Rp 7,785,900.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 97,541,201 dan Rp. 104,365,064. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 September TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 September TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (95,926,500) dan Rp (98,193,865).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 September TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 1,614,701.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.3. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pada Semester I TA 2024 Pengadilan Agama Masamba terhadap Laporan Keuangan tidak terdapat temuan BPK maupun koreksi terhadap Laporan Keuangan TA. 2024, sehingga tidak ada laporan tindak lanjut maupun penyelesaian atas temuan BPK terhadap Laporan Keuangan

F.2.1. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Masamba adalah:

BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0641-01-000281-30-5 a.n. BPG 058 Pengadilan Agama Masamba yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2024 sebesar Rp. 0.

F.2.2. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA BELUM ADA REVISI DIPA

F.2.3. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM Sampai dengan 30 September 2024.

F.2.4. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dan Surat Keputusan Sekreataris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Barang pada SATKER di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Masamba Pejabat Pengelola Keuangan, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen : Alim SE

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Awaluddin, S.P.

Bendahara Pengeluaran : Ahmad Lutfhi Habibullah, AM,d

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Masamba

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2024

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2023	2024	Per 30 September 2024	Per 30 September 2019
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			== NIHIL ==			
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Masamba
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2024

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
	Jumlah :						

